

Aksi Damai Diam Hitam Kamisan di Depan Istana ke 66
JSKK (Jaringan Solidaritas Korban dan Keluarga Korban)
Jl. Bonang 1A, Menteng, Jakarta Pusat 12870, telp. 021-3913473

No. : 39/Surat Terbuka_JSKK/V/2008

Hal : Tolak kenaikan Harga BBM, Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM, Tolak Politisi Busuk

Kepada YTH,

Kepada Yang Terhormat:

Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono

di-

Tempat

Dengan hormat,

Seabad sudah hari kebangkitan nasioanal tapi pada kenyatannya bangsa ini belum juga beranjak dari keadaan krisis dan juga belum tuntasnya penuntasan kasus pelanggaran HAM di indonesia, yang terjadi kondisi bangsa menjadi kian parah, kebijakan pemerintah yang baru saja menaikkan harga BBM justru semakin mempersulit keadaan rakyat, sehingga dengan tegas kami para korban pelanggaran HAM menolak kenaikan harga BBM!

Prilaku pemerintah menaikkan harga BBM menyakiti rakyat miskin negeri ini, situasi ini serupa dengan penolakan pemerintah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, ketika mereka masih berkuasa mereka yang membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dengan menaikkan harga BMM dan melakukan pelanggaran HAM, tapi sekarang saat para korban berbicara HAM dan menolak kenaikan BBM, mereka lantas berbicara tentang HAM dan menolak kenaikan BBM.

Untuk itu kami meminta kepada membatalkan kenaikan BBM, dan segera menyelesaikan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan pada kasus Penculikan dan Penghilangan paksa 1997/1998, Trisakti, Semanggi, I, Semanggi II 1998/1999, tragedi Mei 1998. hal yang sama juga terjadi pada dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi masa orde baru; peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, 27 Juli 1997.

Hentikan mempolitisir rakyat untuk kepentingan kekuasaan secara pribadi. Gerakan penolakan BBM dan penuntasan kasus pelanggaran HAM adalah gerakan rakyat yang menuntut hak-haknya yang dijamin secara konstitusi.

Jakarta, 29 Mei 2008

Hormat Kami,

Jaringan Solidarias Korban dan Keluarga korban pelanggaran HAM (JSKK)

Sumarsih

Suciwati

Bedjo Untung

TEMBUSAN:

1. Kepada Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Kepada Yth. Bapak Ketua Komnas HAM.